

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

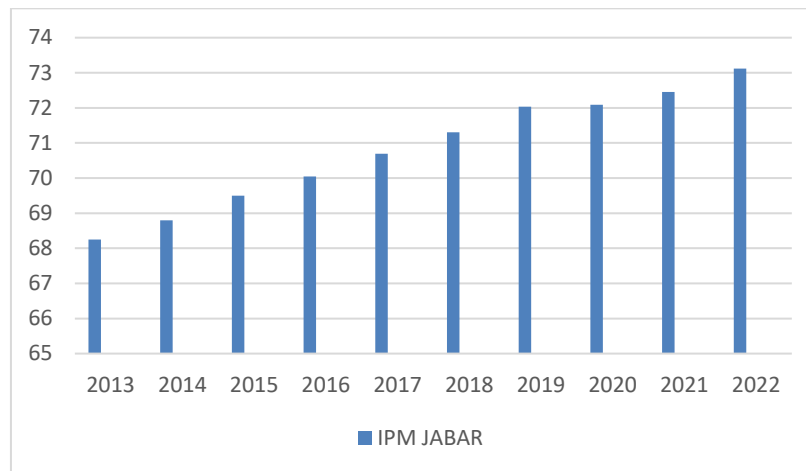
Kesuksesan pembangunan nasional bukan hanya di tinjau dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi yang sangat penting adalah keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan manusia diartikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak terhadap penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar bisa sepenuhnya berpartisipasi disegala bidang pembangunan (BPS, 2011).

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini ialah pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara, salah satu tolak ukur yang digunakan untuk melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (daya beli) (Syofya, 2018).

Pembangunan manusia merupakan indikator bagi kemajuan suatu daerah. Tercapainya pembangunan tidak terlepas dari kualitas masyarakat disuatu wilayah. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia *United Development Programme* (UNDP) telah merilis indikator yang disebut *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan tolak ukur untuk mencapai pembangunan manusia yang lebih berkualitas.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur hasil pembangunan manusia berdasarkan banyak komponen fundamental kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung berdasarkan data yang dapat mewakili keempat komponen yaitu capaian umur panjang dan sektor kesehatan yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah mengukur kinerja pembangunan sektor pendidikan dan daya beli masyarakat akan disesuaikan dengan kebutuhan pokok yang dilihat dari

rata-rata tingkat pengeluaran perkapita dengan pendekatan pendapatan (Chalid dkk, 2014).



Sumber 1 BPS JABAR 2024

Gambar 1-Grafik IPM JABAR

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 27 Kabupaten/Kota. IPM Jawa Barat setiap tahunnya semakin meningkat, mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Ini berarti bahwa upaya pembangunan manusia terus diupayakan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan penduduk di Jawa Barat. IPM Jawa Barat tahun 2022 mencapai 73,12%, meningkat 0,67 poin atau sekitar 0,92% dibandingkan capaian tahun sebelumnya 72,45%, selama periode 2013-2022, IPM Jawa Barat rata-rata meningkat sebesar 0,84% per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada standar hidup layak.

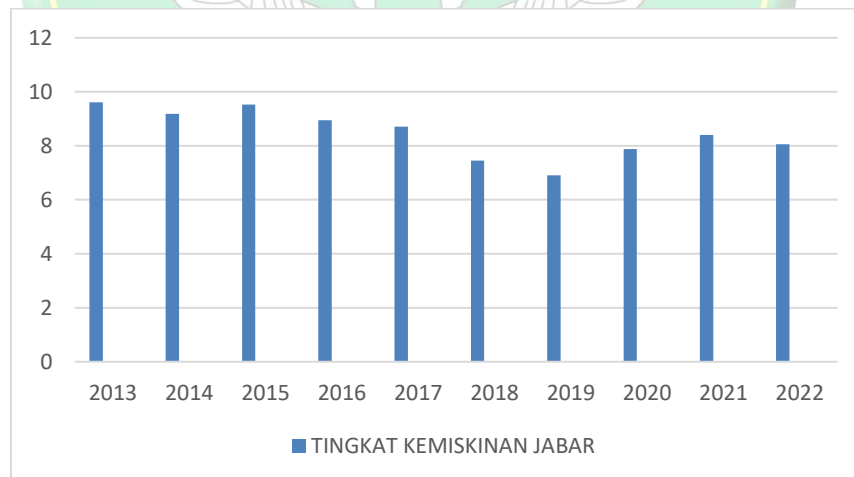
Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang memiliki banyak aspek atau multidimensi. Kemiskinan merupakan permasalahan yang berdampak pada banyak aspek sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu (Berliani, 2021).

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu penyakit ekonomi, sehingga diperlukan solusi atau kebijakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Permasalah kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks serta bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu. Menurut Tambunan (2003),

permasalahan pembangunan utama di banyak negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan atau jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (*Poverty Line*) (Rumate dkk, 2019).

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebagai ketidakberdayaan ekonomi, namun juga sebagai ketidakmampuan memenuhi hak-hak dasar dan perlakuan berbeda terhadap individu atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara universal meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, sumber daya alam, pemenuhan kebutuhan lingkungan hidup, perawatan kesehatan dan keamanan dari ancaman kekerasan, serta partisipasi masyarakat dalam politik (Ningrum, 2017).

Menurut Bank Dunia (2023), salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*Lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*Acceptable*). Selain itu, kemiskinan juga dikaitkan dengan terbatasnya kesempatan kerja dan masyarakat yang tergolong miskin pada umumnya adalah penganggutan dan umumnya mempunyai tingkat pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai (Salsabil dkk, 2023).

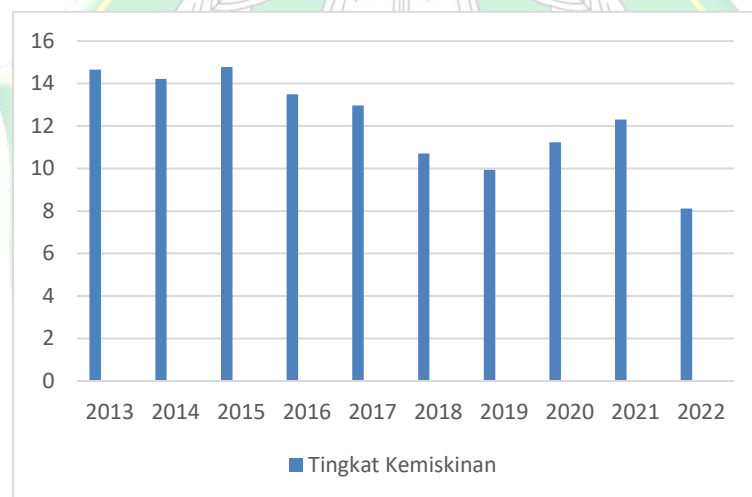


Gambar 2- Grafik Tingkat Kemiskinan JABAR
Sumber 2 BPS JABAR 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jawa Barat tahun 2022 yakni 8,31% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 9,82%. Adapun dari 27 kabupaten/kota, hanya ada delapan daerah yang tingkat

kemiskinannya saat ini masih diatas 10 persen. Delapan daerah itu yakni Kabupaten Cianjur 10,22%, Kabupaten Tasikmalaya 10,28%, Kabupaten Kuningan 12,12% Kabupaten Cirebon 11,20%, Kabupaten Majalengka 11,21%, Kabupaten Indramayu 12,13%, Kabupaten Bandung Barat 10,52%, dan Kota Tasikmalaya 11,53%.

Tingkat kemiskinan dapat dianggap sebagai tolak ukur yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Cirebon berada dalam kedua daerah dengan penduduk miskin terbanyak dibawah Kabupaten Garut. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon per agustus 2023 sebanyak 266.110 atau 12,01%. Sementara jumlah warga di daerah tersebut menembus angka 2.315.417 jiwa (BPS, 2023).



Gambar 3 - Grafik Tingkat Kemiskinan Kab. Cirebon

Sumber: BPS Kab. Cirebon 2023

Grafik diatas menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada periode 2013-2022 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2020 meningkat kembali sebesar 11,24% dan pada tahun 2021 masih terus meningkat mencapai angka 12,30% hal ini disebabkan pandemi covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Kabupaten Cirebon. Sedangkan di tahun 2022 tingkat kemiskinan menurun mencapai angka 12,01%.

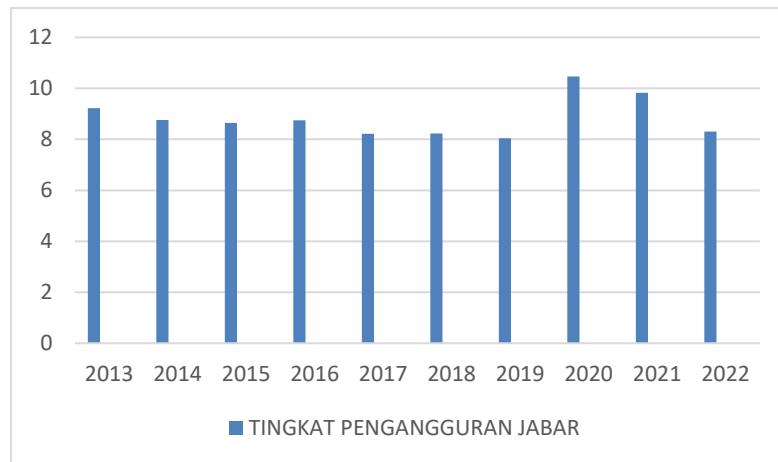
Pengangguran adalah masalah lain dalam perekonomian selain indikator lainnya seperti pertumbuhan ekonomi rendah, tingkat inflasi tinggi, ketidakseimbangan neraca pembayaran dan lainnya. Hampir tidak ada negara di dunia ini mempunyai tingkat pengangguran nol persen, hampir semua negara mempunyai pengangguran yang menjadi masalah berabad-abad yang lalu. Negara yang mempunyai pengangguran rendah bahkan dibawah 4% bisa dikatakan negara tersebut dalam keseimbangan penuh (*full employment*). Bahkan negara maju pun tidak terlepas dari pengangguran (Parwoto, 2019).

Menurut Sukirno (2006:87), pengangguran menyebabkan pendapatan masyarakat dan menurunnya tingkat kesejahteraan yang dicapai, sedangkan semakin menurunnya tingkat kesejahteraan akan menimbulkan permasalahan lain yaitu kemiskinan. pertumbuhan angkatan kerja yang tumbuh yang pesat memberikan beban tambahan pada perekonomian yakni penciptaan atau perluasan kesempatan kerja. Jika lowongan pekerjaan baru tidak dapat mencakup seluruh pekerja, maka jumlah pengangguran yang ada pada bagian angkatan kerja tersebut akan meningkat (Agustina dkk, 2018).

Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah yang cukup serius dihadapi oleh negara berkembang seperti Negara Indonesia. Pengangguran terjadi karena tingginya tingkat perubahan angkatan kerja, yang tidak diimbangi dengan relatif luasnya lapangan kerja atau rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap kerja (Mahroji dkk, 2019).

Keterkaitan antara angkatan kerja dan kemiskinan dalam hal ini akan didekati dengan melihat hubungan antara kemiskinan dan pengangguran. Pemilihan indikator pengangguran dan setengah pengangguran didasari pada kenyataan bahwa kedua indikator tersebut terkait langsung dengan tingkat pendapatan. Seseorang yang menganggur tentunya tidak memiliki pendapatan dari pekerjaan, sementara setengah pengangguran berkaitan erat dengan rendahnya jam kerja dan pendapatan. Secara teoritis, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Dalam hal ini

ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat (Berliani, 2021).



Gambar 4-Grafik Tingkat Pengangguran JABAR
Sumber 3 BPS JABAR 2023

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di Jawa Barat sebesar 8,31% pada tahun 2022 turun sebesar 1,51% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 9,82%. Penurunan lebih tinggi dibandingkan dengan data nasional. Angka ini tergolong besar, bahkan masuk peringkat kedua tertinggi nasional. Angka pengangguran di Jawa Barat sudah turun signifikan dibanding masa awal pandemi Covid-19, yang sempat mencapai 10,46% per Agustus 2020. Adapun pada tahun 2019, angka pengangguran di Jawa Barat cenderung turun hingga sempat mencapai level terendah dalam sedekade terakhir yaitu 8,04%.



Gambar 5 - Grafik Tingkat Pengangguran Kab. Cirebon
Sumber: BPS 2023

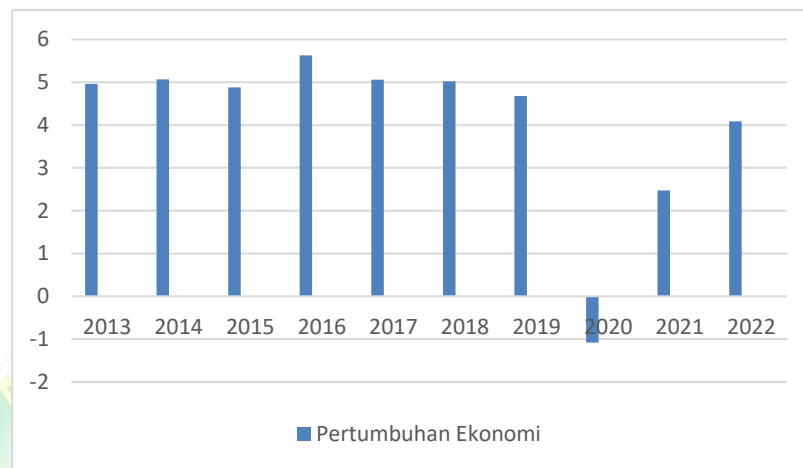
Selain kemiskinan, angka pengangguran di Kabupaten Cirebon juga masih tinggi. Tercatat, sebanyak 90.118 (8,11) warga Kabupaten Cirebon dari total angkatan kerja 1.110.529 jiwa merupakan pengangguran terbuka. Meskipun pengangguran di Kabupaten Cirebon memang masih tinggi, angka tersebut menurun dibandingkan periode 2021 yang mencapai 10,38%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja di Kabupaten Cirebon sebagian besar bekerja disektor jasa dengan persentase 54,23%. Sementara paling kecil, ada di sektor pertanian dengan angka 12,26% (Baihaqi dkk, 2023).

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan faktor penting bagi keberhasilan pembangunan suatu negara. Untuk mengurangi kemiskinan, negara-negara berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maksimum. Kemiskinan disebabkan oleh kurangnya sumber daya atau kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Harlik et al.,2013).

Pemberlakuan upah minimum diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kemiskinan. Menurut Yacoub (2012), kemiskinan seringkali dikaitkan dengan pengangguran. Jika seorang individu atau masyarakat mempunyai pekerjaan, secara teoritis mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan menutupi biaya hidup dengan gaji yang dimilikinya (Oktaviana, 2021).

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi dimana barang dan jasa yang diproduksi suatu masyarakat meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai masalah makroekonmi yang bersifat jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat peningkagtan faktor-faktor produksi biasanya tidak selalu menghasilkan peningkatan produksi barang dan jasa yang serupa. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya (Daniel, 2018).

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan indikator makroekonomi ialah pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) . Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin baik pula kegiatan perekonomian yang dapat diperoleh dari pertumbuhan PDRB atas harga konstan (Noviarita dkk, 2021).

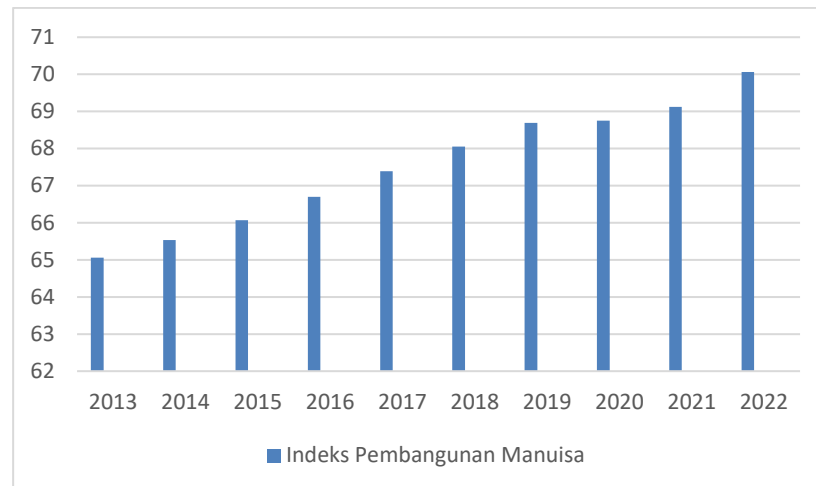


Gambar 6 - Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kab. Cirebon

Sumber: Diskominfo Kab. Cirebon

Pada grafik diatas periode 2013-2022 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya, angka tertinggi pada periode 2013-2022 yaitu pada tahun 2014 menyentuh angka 5,07% dan paling rendah di angka -1,08% pada tahun 2020 setelah itu angka pertumbuhan ekonomi meningkat kembali di angka 2,47% pada tahun 2021 dan 4,09% pada tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada sejauh mana kegiatan ekonomi menghasilkan pendapatan tambahan bagi suatu masyarakat selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika output riil dari penggunaan faktor-faktor meningkat dalam satu tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ketika harga konstan.



Gambar 7 - Grafik IPM Kab. Cirebon

Sumber: Bapelitbangda 2022

Badan Perencanaan pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Cirebon mendata tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu di angka 70,16, dimana sebelumnya berada di peringkat dua dari bawah. Pada tahun 2019 IPM di Kabupaten Cirebon berada pada angka 68,69, kemudian di tahun 2020 IPM mengalami peningkatan menjadi 68,75, pada tahun 2021 berada di angka 69,12 dan pada tahun 2022 berada di angka 70,16 (Zaenal, 2023).

Akan tetapi penelitian yang mengkaji pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi ini belum banyak khususnya di Kabupaten Cirebon. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Jasasila (2020) yang meneliti pengaruh tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk terhadap indeks pembangunan di Indonesia. Ningrum dkk (2020) yang meneliti pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2014-2018. Komariah dkk (2019) yang meneliti pengaruh belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan latar belakang diatas, capaian IPM di Kabupaten Cirebon memang memiliki kecenderungan meningkat secara absolut, laju IPM Kabupaten Cirebon tidak secepat penurunan persentase kemiskinan, pengangguran dan kensikan pertumbuhan ekonomi, hal ini menjadi sorot

perhatian. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Mediasi di kabupaten Cirebon”*. Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan dapat mengisi celah kosong atau kekurangan yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi penurunan kemiskinan dan pengangguran serta kenaikan pertumbuhan ekonomi dan IPM khususnya di Kabupaten Cirebon.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah makroekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah dan menyebabkan ketidakstabilan sosial.
2. Pertumbuhan ekonomi yang rendah mengacu pada laju Produk Domestik Bruto (PDB) yang lambat pertumbuhan yang rendah dapat menyebabkan penurunan investasi, kurangnya kesempatan kerja, dan penurunan daya beli masyarakat.
3. Tingkat kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya upah minimum, rendahnya taraf hidup masyarakat, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahunnya tanpa adanya kesempatan kerja.
4. Banyaknya pengangguran akan membuat pendapatan perkapita rendah sehingga menimbulkan efek kemiskinan.
5. Tingginya kemiskinan dan diimbangi dengan sempitnya kesempatan kerja akan menyebabkan rendahnya profuktifitas penduduk.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang ditemukan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar peneliti fokus terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dalam penelitian ini hanya dibatasi tentang permasalahan makro ekonomi mengenai kemiskinan dan pengangguran di wilayah Kabupaten Cirebon.
2. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia di tingkat regional
3. Data yang digunakan yaitu data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat partisipasi angkatan kerja, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf di Kabupaten Cirebon

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon secara langsung?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon secara langsung?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon secara langsung?
4. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pertumbuhan ekonomi?
5. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pertumbuhan ekonomi?

E. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon secara langsung.
- b. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon secara langsung.

- c. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon secara langsung.
- d. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi
- e. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi

2. Manfaat

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini mampu memberikan pemahaman kemampuan akademis dan wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang seberapa pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota, laju pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Penelitian ini sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggung jawab akademik dalam disiplin ilmu khususnya ilmu ekonomi. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam ilmu dan diharapkan sebagai literatur yang baru bagi daftar kepustakaan untuk memperkaya referensi karya ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat tentang landasan teori yang relevan dalam penulisan penelitian ini pada bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan unit observasi, jenis dan sumber data, populasi dan sample, uji prasyarat dan uji statistik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait deskripsi data hasil penelitian dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian serta menguraikan terkait pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran.

